

DETERMINAN DISPARITAS ANTAR WILAYAH DI INDONESIA

Rosmeli

Magister Ilmu Ekonomi, Ekonomi Pembangunan, Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Jambi, Kampus Pinang Masak, UNJA Mendalo Darat E-mail: rosmeli.vina@yahoo.com

ABSTRAK

In the New Order era, the Indonesian government has made a paradigm of development as the foundation is the reference value of all government policies, it is this which causes the system of centralized government. So there is inequality of development between regions. Based on the background above, this study aimed to find out the impact of fiscal decentralization on diparitas among regions in Indonesia and know the factor-factor disparitas zoom in and between regions in Indonesia. The data used are secondary data with 19-year time series. Since the implementation of research results show an impact of fiscal decentralization on the growing disparities between regions in Indonesia when compared with the prior fiscal decentralization. Allocation of funds for the Health Sector, Capital Investment in State and central government transfers to the regions enlarging disparities between regions in Indonesia, while the allocation of funds for education and road infrastructure to reduce Inter-Regional Disparity in Indonesia.

Keywords: Decentralization and Inequality

I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Secara teoritis tujuan desentralisasi mengisyaratkan pelimpahan wewenang fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang akan memudahkan pemerintah daerah memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat local sehingga akan menghasilkan efisiensi penyediaan barang public, pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Semenjak diimplementasikan desentralisasi fiskal pada tahun 2001 telah terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah daerah yang relatif besar. Fenomena ini merupakan konsekuensi dari peningkatan kewenangan daerah dalam mengalokasikan dana termasuk dana perimbangan. Apabila pemerintah daerah mampu mendesain dan merencanakan pembangunan di daerah sesuai dengan potensi dan karakteristik yang dimiliki masing-masing, maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan yang akan memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat di setiap daerah.

Jika peningkatan dana pengeluaran tidak disertai dengan penggunaan yang lebih efektif maka tidak akan memberikan dampak yang optimal terhadap perekonomian daerah. Faktanya setelah diimplementasikan desentralisasi fiskal disparitas antar daerah masih terjadi terutama antara daerah yang relatif kaya dan daerah yang relatif miskin.

Daerah yang relatif kaya mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sehingga berdampak bagi kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Hal ini sangat jauh berbeda dengan daerah-daerah yang relatif miskin khususnya kawasan timur Indonesia. Tingkat kemiskinan nasional menurun dari 23,43 persen (1999) menjadi 14,15 persen (2009). Bila dilihat lebih jauh tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Indonesia juga mengalami penurunan, kabupaten/kota yang relatif kaya menerima manfaat yang lebih besar dari program pemulihan ekonomi. Kabupaten/kota yang relatif lebih kaya dapat menurunkan tingkat kemiskinan sampai dengan setengah dari tingkat sebelumnya. Namun

kabupaten/kota yang relatif lebih miskin tingkat kemiskinan hanya turun sekitar seperempatnya. Akibatnya kesenjangan pendapatan antara kabupaten/kota yang relatif kaya dengan yang relatif lebih miskin menjadi semakin besar. Kabupaten/kota yang relatif kaya tumbuh di atas angka rata-rata nasional sebesar 5,63 persen (2008), sementara tingkat pertumbuhan di kabupaten/kota yang relatif miskin berada di bawah angka rata-rata nasional 5,39 persen (2008) dengan pertumbuhan nasional 5,59 persen. Tingkat kemiskinan masih lebih tinggi pada wilayah-wilayah yang bergantung pada sektor pertanian, karena sektor manufaktur dan jasa tumbuh melampaui sektor pertanian.

Pendidikan, kesehatan dan fasilitas fisik di sejumlah kota besar di Indonesia jauh lebih baik bila dibandingkan dengan kota-kota lainnya, khususnya kawasan timur Indonesia. Pada wilayah kawasan timur Indonesia kondisinya menyamai setaradengan kondisi di sebagian besar negara Afrika.

Ketidakmerataan fasilitas infrastruktur ekonomi dan sosial menyebabkan tingginya variasi PDRB perkapita antar daerah. Nilai PDRB perkapita riau dan kalimantan timur, yang berperan sebagai penghasil minyak dan gas,

hampir 12 kali lebih tinggi dari pada PDRB Maluku atau Nusa Tenggara Timur (NTT). Sejumlah kota memiliki tingkat kemiskinan dibawah 3 persen, tapi Irian Jaya Barat dan Papua tingkat kemiskinan yang masih berada diatas 35 persen (2009).

Desentralisasi fiskal diimplementasikan dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi sosial ekonomi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Tetapi semenjak diberlakukannya kebijakan tersebut disparitas antar daerah menjadi semakin lebar

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui dan menganalisis determinan 1 disparitas antar wilayah di Indonesia

II. Tinjauan Pustaka

2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi regional adalah pertambahan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh yang terjadi di wilayah tersebut. Hal ini juga sekaligus menggambarkan balas jasa bagi

faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut yang berarti kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi *transfer-payment* yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah.

Faktor yang menjadi perhatian utama dalam teori pertumbuhan ekonomi regional adalah (a) Keuntungan Lokasi, (b) Aglomerasi Migrasi dan (c) Arus lalu lintas modal antar wilayah.

2.1.1.1. Teori Ekonomi Keynesian

Model permintaan makro regional merupakan turunan langsung teori ekonomi makro Keynes jangka pendek yang diaplikasikan pada tingkat perekonomian regional dengan penekanan analisis pada sisi permintaan agregat. Termasuk ke dalam kelompok model permintaan makro regional antara lain adalah teori atau model basis ekonomi (*the economic base model*) dan model penggandaan regional Keynesian (*Keynesian Regional Multiplier*).

1. Model Basis Ekonomi

Model basis ekonomi membedakan aktivitas perekonomian regional menjadi sektor basis (*basic sector*) dan sektor non-basis (*non-basic sector*). Sektor basis adalah sektor yang kinerjanya terutama bergantung pada pengaruh kondisi ekonomi eksternal terhadap perekonomian lokal (McCann 2001).

Model basis ekspor dapat memberikan penjelasan dan pemahaman proses pertumbuhan ekonomi regional secara sederhana, namun model ini tidak mempertimbangkan kemungkinan kendala yang muncul bagi keberlanjutan aktivitas industri basis dalam jangka panjang karena keberadaan *diseconomies of agglomeration* (McCann 2001). Hal ini sejalan dengan pemikiran Tibout (1956) yang mengemukakan keraguannya terhadap model basis ekonomi. Skala disekonomi dapat terjadi sebagai akibat semakin langkanya sumberdaya, peningkatan sewa tanah, upah tenaga kerja.

2. Model Penggandaan Regional Keynesian

Model penggandaan Keynesian pada tingkat perekonomian regional merupakan penyesuaian model makro jangka pendek Keynes pada tingkat perekonomian agregat nasional. Model pendapatan-permintaan agregat standar Keynesian, untuk suatu wilayah tertentu dapat diekspresikan sebagai (Richardson, 1979 dan Mc Cann, 2001):

$$Y_r = C_r + I_r + G_r + X_r - M_r \dots\dots(5)$$

Selain ekspor ke luar regional, setiap komponen permintaan agregat regional pada persamaan 5, dianggap sebagai fungsi dari pendapatan regional setelah pajak atau pendapatan regional disposable, sebagai berikut:

$$C_r = C_0 + cY_{rd} \dots\dots\dots(6)$$

$$I_r = \bar{I} + iY_{rd} \dots\dots\dots(7)$$

$$G_r = \bar{G} - gY_{rd} \dots\dots\dots(8)$$

$$M_r = \bar{M} + mY_{rd} \dots\dots\dots(9)$$

$$T_r = tY_r \dots\dots\dots(10)$$

$$Y_{rd} = Y_r - tY_r \dots\dots\dots(11)$$

Bila diamati persamaan-persamaan di atas, perbedaan ekspresi permintaan agregat nasional dengan permintaan agregat regional terutama terletak pada persamaan 7, 8, dan 9. Pada persamaan 7, investasi pihak swasta

pada tingkat regional merupakan fungsi dari pendapatan regional, bukan tingkat bunga seperti pada permintaan agregat nasional. Alasannya adalah kepercayaan pelaku bisnis lokal dan keinginan lembaga perbankan untuk menyediakan pinjaman bagi kegiatan bisnis lokal sangat bergantung pada kondisi perekonomian lokal yang dicerminkan oleh tingkat pendapatannya. Pada persamaan 8, arus pengeluaran pemerintah tidak bersifat otonom, tetapi berhubungan negatif dengan pendapatan regional. Selain itu, wilayah-wilayah miskin biasanya juga menjadi penerima subsidi pemerintah yang lebih besar dalam kebijakan pendanaan regional.

Kebijakan ini erat kaitannya dengan fungsi pengeluaran pemerintah sebagai penyeimbang parsial dalam mengatasi masalah disparitas pendapatan antar wilayah. Perbedaan ketiga ditunjukkan oleh komponen arus impor pada persamaan 9. Pada model pendapatan-permintaan agregat regional, impor merupakan pengeluaran pelaku ekonomi lokal yang dibelanjakan terhadap barang-barang atau jasa-jasa dari luar wilayah tersebut, baik dari wilayah lain atau luar negeri (McCann, 2001).

2.1.1.2. Teori Ekonomi Neo-Klasik

Teori pertumbuhan neo klasik dikembangkan oleh Robert M.Solow(1970) dari Amerika Serikat dan T.W.Swan (1956) dari Australia. Model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi capital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi. Selain itu model ini menggunakan fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara Kapital (K) dan Tenaga kerja (L). Dengan demikian, syarat-syarat adanya pertumbuhan yang mantap dalam model Solow-Swan kurang restriktif disebabkan kemungkinan substitusi antara modal dan tenaga kerja. Hal ini berarti adanya fleksibilitas dalam rasio modal-output dan rasio modal-tenaga kerja.

Teori Solow-Swan melihat bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan sehingga pemerintah tidak perlu terlalu banyak mencampuri pasar. Campuran pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga suber yaitu, akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja dan peningkatan

teknologi. Peningkatan teknologi ini terlihat dari peningkatan skill atau kemajuan teknik sehingga produktivitas perkapita meningkat.

Teori neoklasik menganjurkan agar kondisi selalu diarahkan untuk menuju pasar persaingan sempurna. Dalam keadaan pasar persaingan sempurna, perekonomian bisa tumbuh maksimal, kebijakan yang perlu ditempuh adalah meniadakan hambatan dalam perdagangan termasuk perpindahan orang, barang dan modal. Harus dijamin kelancaran arus barang, modal, tenaga kerja dan perlunya penyebaran informasi pasar.

Model Neo Klassik mengatakan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pertumbuhan suatu negara dengan perbedaan kemakmuran daerah (regional disparity) pada negara yang bersangkutan. Pada saat proses pembangunan baru dimulai (NSB) tingkat perbedaan kemakmuran antar wilayah cenderung menjadi tinggi (Divergence) sedangkan bila proses pembangunan telah berjalan dalam waktu lama (Negara maju) maka perbedaan tingkat kemakmuran antar wilayah cenderung menurun.

2.3. Disparitas Antar Wilayah

Ketidakseimbangan dalam perkembangan ekonomi antar wilayah juga dikarenakan masing-masing daerah mempunyai tingkat aktivitas ekonomi yang berbeda. Tidak semua daerah mempunyai daya tarik yang mendorong investor menanamkan modalnya dan terdapatnya daerah yang relative langka sumber alamnya. Sehingga distribusi pendapatan antar daerah tidaklah merata. Menurut pandangan Williamson (1965) dalam Delis (2008) pertumbuhan tidak selalu terjadi secara merata pada semua wilayah. Pada tahap awal, proses pembangunan cenderung terkonsentrasi dan terpolarisasi pada area pusat suatu negara. Penyebarannya ke wilayah pinggiran dan sektor-sektor yang relatif lemah hanya terjadi secara subsekuen. Konsekuensi dari keberadaan dua bentuk kecepatan pembangunan yang berbeda tersebut adalah meluasnya jurang antara wilayah pada fase awal pembangunan ekonomi di suatu negara, namun kemudian berkurang ketika pendapatan nasional mencapai tingkat tertentu.

Meluasnya ketimpangan antara wilayah kuat dan lemah dalam fase awal pembangunan bersumber dari

keberadaan efek *crowding-out* antar wilayah kuat dan wilayah lemah dalam bentuk (1) emigrasi tenaga kerja skill dari wilayah yang relatif lemah ke wilayah yang lebih kuat; (2) arus masuk kapital ke wilayah kaya karena permintaan yang lebih tinggi, ketersediaan infrastruktur yang lebih baik, ketersediaan pelayanan publik dan potensi pasar, kondisi lingkungan yang lebih baik bagi perusahaan; (3) alokasi investasi publik lebih besar ke wilayah kuat dalam merespon permintaan potensial dan aktual; (4) keterbatasan perdagangan sumberdaya antar wilayah sehingga pada tahap awal, perkembangan yang terjadi wilayah kaya tidak menghasilkan efek sepenuhnya terhadap wilayah miskin.

Sepanjang waktu, proses tersebut semakin memperburuk disparitas regional pada suatu negara hingga mekanisme kerja mulai beroperasi dalam arah berlawanan, misalnya melalui: (1) penciptaan pekerjaan baru pada wilayah kurang berkembang yang menurunkan atau menghentikan emigrasi ke wilayah lebih kaya; (2) menurunnya daya tarik wilayah lebih maju karena kejenuhan pasar dan kepadatan fisik yang selanjutnya meningkatkan sewa tanah dan menurunkan tingkat

profit rata-rata; (3) pertumbuhan investasi publik pada wilayah lemah yang mempunyai efek ganda yaitu lahirnya sistem produksi lokal yang memerlukan lebih banyak investasi dalam kapital sosial dan tumbuhnya investasi privat pada wilayah lemah; dan (4) munculnya efek penuh pengaruh wilayah kuat ke wilayah lemah.

2.4. Penyebab Disparitas Antar Wilayah

Ada beberapa factor yang menentukan ketimpangan antar wilayah, antar lain yaitu (syafrijal, 2008):

a. Perbedaan Kandungan Sumberdaya Alam

Perbedaan kandungan sumberdaya alam ini jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumberdaya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relative murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumberdaya alam lebih rendah.

b. Perbedaan Kondisi Demografis

Perbedaan tingkat pertumbuhan dan stuktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan

dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan.

Kondisi demografis ini akan dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah bersangkutan.

c. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Alasannya adalah karena bila mobilitas tersebut kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual kedaerah lain yang membutuhkan.

c. Kosentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah

Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong proses

pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat.

d. Alokasi dana Pembangunan Antar Wilayah

Tidak dapat disangkal bahwa investasi merupakan salah satu yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena itu, daerah yang dapat alokasi investasi yang lebih besar dari pemerintah, atau dapat menarik lebih banyak investasi swasta akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang berbentuk time series yang terdiri dari: Produk Domestik Bruto Indonesia; Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Investasi Sektor Swasta yaitu PMA dan PMDN. Data yang digunakan bersumber dari lembaga atau instansi resmi pemerintah seperti bank indonesia, bps dan dari situs-situs internet yang telah diolah lebih lanjut

3.2. Analisis Data

Untuk menjawab tujuan dari penelitian ini digunakan model regresi step wise, dengan software Microfit 4.0 dengan formul regresi sebagai berikut.

$$Iw = f(Ig, Ip, Raf) \dots\dots\dots(1)$$

Dimana:

- Ig : Investasi Pemerintah Yang terdiri dari investasi pendidikan, investasi kesehatan, investasi jalan, investasi listrik, dan investasi irigasi
- Ip : Investasi Swasta PMA dan PMDN
- Raf : Transfer pemerintah pusat ke daerah

$$Iw = \beta_1 + \beta_2 LPDK + \beta_3 LKSH + \beta_4 LJLN + \beta_5 LLST + \beta_6 LIRGS + \beta_7 LPMA + \beta_8 LMPDN + \beta_9 LRAF + \mu e \dots\dots\dots(2)$$

Dimana:

- : Konstanta
- Iw : Indeks Williamson
- PDK : Investasi Pendidikan
- KHS : Investasi Kesehatan
- JLN : Investasi Jalan
- IRGS : Investasi Irigasi
- LST : Investasi Listrik
- PMA : Penanaman Modal Asing
- PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri
- RAF : Transfer Pusat Daerah

IV. Hasil dan Pembahasan

Untuk melihat Faktor- factor apa yang meperbesar dean memperkecil disparitas antar wilayah di Indonesia, digunakan model step wise. Regresi Stepwise adalah salah satu metode untuk mendapatkan model terbaik dari sebuah analisis regresi. Secara definisi adalah gabungan antara metode *forward* dan *backward*, variabel yang pertama kali masuk adalah variabel yang korelasinya tertinggi dan significant dengan

variabel *dependent*, variabel yang masuk kedua adalah variabel yang korelasi parsialnya tertinggi dan masih *significant*, setelah variabel tertentu masuk ke dalam model maka variabel lain yang ada di dalam model dievaluasi, jika ada variabel yang tidak *significant* maka variabel tersebut dikeluarkan. Dari hasil regresi step wise diperoleh model regresi terbaik sebagai berikut:

$$Iw = \beta_1 - \beta_2 LPDK + \beta_3 LKSH - \beta_4 LJLN + \beta_5 LPMDN + \beta_6 LRAF + \mu e$$

Tabel 1. Hasil Regresi

```

*****
Regressor          Coefficient      Standard Error    T-Ratio  [Prob]
CON                4.1673          2.0154            2.0677  [.059]
LPDK              -.065945        .046838           -1.4079  [.183]
LKSH              .078385         .036189           2.1660  [.049]
LJLN              -.48570         .21530            -2.2560  [.042]
LPMDN             .085928         .016058           5.3509  [.000]
LRAF              .075157         .013218           5.6861  [.000]
*****
R-Squared          .96637          R-Bar-Squared     .95343
S.E. of Regression .023381        F-stat. F( 5, 13) 74.7081[.000]
DW-statistic      2.1239
*****
    
```

Diagnostic Tests

```

*****
* Test Statistics *
*****
* A:Serial Correlation *CHSQ( 1)= .68515[.408] *F( 1, 12) = .44891[.516]*
* * * * *
* B:Functional Form *CHSQ( 1)= .95324[.329] *F( 1, 12) = .63385[.441]*
* * * * *
* C:Normality *CHSQ( 2)= 1.5643 [.457] * Not applicable *
* * * * *
* D:Heteroscedasticity *CHSQ( 1)= 3.1778[.075] *F( 1, 17)= 3.4144[.082]*
*****
    
```

Berdasarkan Hasil regresi diatas terdapat empat variable yang mempunyai pengaruh signifikan secara parsial terhadap indeks Williamson yaitu Alokasi dana untuk sektor kesehatan, Jalan, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Transfer Dana Pemeritnah Pusat ke Daerah, sedangkan variable yang lain tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks Williamson secara parsial, tetapi secara simultan seluruh varibel independent mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks Williamson yang terlihat dari nilai F hitung sebesar 74.7081 dengan probabilita (0.000) yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05. Apabila dilihat dari nilai R^2 sebesar 0.96637, ini berarti 96.637 persen indeks Williamson dipengaruhi oleh PDK, KSH, JLN, PMDN dan RAF sedangkan sisanya 3.363 persen dipengaruhi oleh factor –faktor lainnya.

Apabila semua variable independent dianggap constant maka indeks Williamson akan mengalami peningkatan. Tetapi apabila terjadi peningkatan pada 1 persen alokasi dana pada sektor pendidikan dan jalan maka indeks Williamson akan mengalami penurunan, yang artinya disparitas

antar wilayah semakin mengecil. Hal ini dikarenakan peningkatan alokasi dana pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah dapat perbaikan pada sektor pendidikan, seperti sarana dan prasaran sekolah serta kesejahteraan guru dan dosen yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia yang lebih baik, peningkatan mutu sumber daya manusia akan dapat meningkatkan produktivitas yang dihasilkan, walaupun masih terkonsentrasinya pendidikan yang bermutu di pulau Jawa, yang ditunjukkan dengan banyaknya sekolah dan universitas favorit yang berada dipulau Jawa menyebabkan tingkat pendidikan di pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. inilah yang menyebabkan secara parsial alokasi dana pendidikan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penurunan indeks Williamson.

Untuk alokasi dan pada infrastruktur jalan dapat memperkecil disparitas antar wilayah di Indonesia dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks Williamson, dikarenakan jalan

merupakan pintu awal dari penggerak roda perekonomian daerah, dan untuk mencapai suatu wilayah yang kaya akan potensi ekonomi, sehingga roda kegiatan perekonomian di daerah tersebut dapat lebih berkembang. Dengan semakin memperbesar dana alokasi jalan, ini dapat membantu mempercepat proses aktivitas ekonomi, sayangnya peningkatan dana alokasi jalan lebih banyak ditujukan untuk membangun jalan – jalan di Pulau Jawa sementara daerah lain kurang mendapat alokasi dana tersebut. Selain hal tersebut, jalan dapat juga merupakan pondasi awal untuk masuknya listrik ke daerah –daerah yang membutuhkan, listrik akan sangat membantu dalam kegiatan produksi, dengan kondisi listrik yang memadai maka kegiatan produksi dapat berjalan, sehingga kegiatan perekonomian dapat ditingkatkan di daerah yang belum terpasang listrik. Padahal dengan adanya aktivitas ekonomi yang lebih baik, maka masyarakat dapat meningkatkan pendapatan yang diterima, sehingga disparitas yang ada dapat diperkecil.

Peningkatan 1 persen alokasi dana untuk sektor kesehatan, penanaman modal dalam negeri dan transfer pemerintah pusat ke daerah

akan memperbesar disparitas antar wilayah di Indonesia. Tetapi ketiga variable ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks Williamson. Sektor kesehatan tidak dapat memperkecil disparitas antar wilayah di Indonesia, walaupun sektor kesehatan merupakan program penting bagi pemerintah peningkatan alokasi dana pada sektor ini lebih cenderung terpusat di suatu wilayah, yang akhirnya menyebabkan disparitas semakin membesar.

Sesuai dengan tujuan adanya dana perimbangan, dana yang dialokasikan pemerintah pusat kepada daerah memberikan seharusnya dampak memperkecil disparitas antar wilayah di Indonesia. Dengan adanya transfer pusat ke daerah dapat membantu pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah yang tidak dapat dibiayai oleh pemerintah daerah itu sendiri, sehingga daerah – daerah tersebut dapat menjalankan kegiatannya secara lebih baik.

Bantuan pemerintah melalui transfer pusat ke daerah seharusnya memegang peranan penting untuk mengurangi disparitas antar wilayah di Indonesia, karena hampir semua daerah di Indonesia tidak mempunyai dana yang berasal dari daerah mereka sendiri (kecuali DKI

Jakarta, Kutai Kartanegara dan Riau) yang cukup untuk membiayai kegiatan – kegiatan yang dilakukan yang pada gilirannya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, tetapi dari hasil regresi diatas diketahui bahwa transfer pemerintah pusat ke daerah menyebabkan disparitas antar daerah menjadi semakin memperbesar. Hal ini tidak terlepas dari dana perimbangan yang diberikan saat ini lebih besar dari PAD yang dimiliki oleh masing – masing daerah, sehingga kebutuhan akan pusat semakin membesar. Sementara dana perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam yang diberikan semakin memperbesar ketimpangang antar daerah yang kaya akan sumber daya alam dengan daerah lain yang miskin akan sumber daya alam.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas diketahui bahwa selama periode 1990 - 2008 Alokasi dana untuk Sektor Kesehatan, Penanaman Modal dalam Negeri dan transfer Pemerintah pusat ke daerah memperbesar disparitas antar wilayah di Indonesia, sedangkan Alokasi Dana untuk Pendidikan dan infrastruktur Jalan memperkecil Disparitas Antar Wilayah di Indonesia.

5.2. Saran

Selain itu alokasi dana untuk sektor pendidikan, infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah harus diperhatikan pola pendistribusiannya, artinya pemerintah harus lebih memperbanyak alokasi ke daerah luar pulau Jawa, selain itu kebijakan penanaman modal asing juga harus lebih diarahkan ke daerah luar pulau Jawa. sehingga peningkatan sektor-sektor tersebut akan memberikan dampak meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkurangnya disparitas antar wilayah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar Rhosyied, 2010, *Regresi Model Stepwise*. www.google.com
- Christian Lessmann. www.envplan.com. “Fiscal Decentralization and Regional Disparity: Evidence from cross-section and panel data”
- Dartanto, Teguh dan Bambang PS Brodjonegoro, 2003 *Dampak Desentralisasi Fiskal di Indonesia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Daerah: Analisa Model Ekonomi Makro Simultan.*” Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol. 4, No. 1 Juli.

- Delis, arman 2008. *Peran Infrastruktur sebagai pendorong dinamika ekonomi sektoral dan regional berbasis pertanian*. Disertasi. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Joko Waluyo, 2007. "Dampak Desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar daerah di Indonesia". Makalah 12 Desember 2007, UI – Depok.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004. "Otonomi daerah dan Pembangunan daerah: Reformasi, perencanaan, strategi dan Peluang", Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Lukaman Edy, 2009. "Mengurangi Kesenjangan". *Republika* 1 Agustus 2009.
- Mahi, Raksaka; Panggabean, Adrian, Brodjonegoro, Bambang dan Panggabean, Martin (eds), 2000. "Konsep dan Distribusi Dana Alokasi Umum (DAU)." Jakarta: FE UI.
- Sjafrizal, 1997. "Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat." Prisma, 3 Maret.
- Saiful Arief, 2005. "Kesenjangan Pembangunan Antar-wilayah". <http://www.suarakarya-online.com>
- Tommy Firman. www.informa.world Potential impacts of Indonesia's fiscal decentralisation reform on urban regional development: Towards a new pattern of spatial disparity